

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Provinsi Banten adalah sebuah Provinsi di wilayah paling barat Pulau Jawa. Banten pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2000 melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Banten menjadi Provinsi sebagai wilayah pemekaran. Ketertinggalan pembangunan merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi Provinsi Banten menjadi wilayah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui serangkaian usaha dengan memperluas kesempatan kerja dan mengarah pada pembagian pendapatan secara merata. Pembangunan dalam pengertian yang luas merupakan proses multidimensi yang mencakup banyak perubahan yang sifatnya mendasar atas struktur sosial yang ada di masyarakat, sikap-sikap di masyarakat, institusi atau lembaga nasional yang ada, juga mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi ketimpangan pendapatan serta upaya mengatasi kemiskinan (Todaro, 2009).

Dengan berpisahannya dari Provinsi Jawa Barat, bukan berarti pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan mulus tanpa hambatan. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Banten. Menurut Hasyim (2016), Pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan, karena pendapatan termasuk salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan.

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi (%)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACEH	8,37	9,00	9,06	10,12	9,02	9,93	7,57	6,57	6,34	6,17	6,59	6,30
SUMATERA UTARA	7,43	8,18	6,28	6,45	6,23	6,71	5,84	5,60	5,55	5,39	6,91	6,33
SUMATERA BARAT	6,95	8,02	6,65	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52
RIAU	8,72	6,09	4,37	5,48	6,56	7,83	7,43	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42
JAMBI	5,39	4,63	3,20	4,76	5,08	4,34	4,00	3,87	3,73	4,06	5,13	5,09
SUMATERA SELATAN	6,65	6,60	5,66	4,84	4,96	6,07	4,31	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98
BENGKULU	4,59	3,46	3,62	4,61	3,47	4,91	3,30	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65
LAMPUNG	5,57	6,38	5,20	5,69	4,79	5,14	4,62	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69
KEP. BANGKA BELITUNG	5,63	3,86	3,43	3,65	5,14	6,29	2,60	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03
KEP. RIAU	6,90	5,38	5,08	5,63	6,69	6,20	7,69	7,16	8,04	7,50	10,34	9,91
DKI JAKARTA	11,05	11,69	9,67	8,63	8,47	7,23	6,12	7,14	6,65	6,54	10,95	8,50
JAWA BARAT	10,33	9,96	9,08	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46	9,82
JAWA TENGAH	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95
DI YOGYAKARTA	5,69	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56
JAWA TIMUR	4,25	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74
BANTEN	13,68	13,74	9,94	9,54	9,07	9,55	8,92	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98
BALI	3,06	2,95	2,10	1,83	1,90	1,99	1,89	1,48	1,40	1,57	5,63	5,37
NUSA TENGGARA BARAT	5,29	5,25	5,23	5,30	5,75	5,69	3,94	3,32	3,58	3,28	4,22	3,01
NUSA TENGGARA TIMUR	3,34	3,11	3,04	3,25	3,26	3,83	3,25	3,27	2,85	3,14	4,28	3,77
KALIMANTAN BARAT	4,62	4,60	3,54	3,99	4,04	5,15	4,23	4,36	4,18	4,35	5,81	5,82
KALIMANTAN TENGAH	4,14	3,54	3,14	3,00	3,24	4,54	4,82	4,23	3,91	4,04	4,58	4,53
KALIMANTAN SELATAN	5,25	6,29	5,19	3,66	3,80	4,92	5,45	4,77	4,35	4,18	4,74	4,95
KALIMANTAN TIMUR	10,10	11,43	9,02	7,95	7,38	7,50	7,95	6,91	6,41	5,94	6,87	6,83
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	5,68	5,23	5,54	5,11	4,49	4,97	4,58
SULAWESI UTARA	9,61	10,10	7,98	6,79	7,54	9,03	6,18	7,18	6,61	6,01	7,37	7,06
SULAWESI TENGAH	4,61	6,78	3,95	4,19	3,68	4,10	3,29	3,81	3,37	3,11	3,77	3,75
SULAWESI SELATAN	8,37	8,13	6,01	5,10	5,08	5,95	4,80	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72
SULAWESI TENGGARA	4,61	4,69	4,14	4,38	4,43	5,55	2,72	3,30	3,19	3,52	4,58	3,92
GORONTALO	5,16	6,74	4,47	4,15	4,18	4,65	2,76	4,28	3,70	3,76	4,28	3,01
SULAWESI BARAT	3,25	3,35	2,16	2,35	2,08	3,35	3,33	3,21	3,01	2,98	3,32	3,13
MALUKU	9,97	10,81	7,71	9,91	10,51	9,93	7,05	9,29	6,95	6,69	7,57	6,93
MALUKU UTARA	6,03	5,34	4,82	3,80	5,29	6,05	4,01	5,33	4,63	4,81	5,15	4,71
PAPUA BARAT	7,68	6,73	5,42	4,40	5,02	8,08	7,46	6,49	6,45	6,43	6,80	5,84
PAPUA	3,55	5,02	3,71	3,15	3,44	3,99	3,35	3,62	3,00	3,51	4,28	3,33
INDONESIA	7,14	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2010-2021(%)

Sumber : BPS Nasional (2021, data diolah)

Data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan jika dalam kurun waktu 2010-2021 tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebanyak 13,68% kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 13,74% dan pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami penurunan menjadi 9,94% hingga 9,07%, namun pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 5,56%. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 tingkat pengangguran

di Provinsi Banten cenderung menurun dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2020. Provinsi Banten termasuk kedalam provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka terbanyak dalam setiap tahunnya.

Walaupun tingkat pengangguran Provinsi Banten cenderung menurun, namun angkanya masih dibidang cukup tinggi. Menurut Sukirno (2015), bahwa tingkat pengangguran yang wajar berkisar antara 2-3%. Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak 2-3% dari jumlah tenaga kerja, maka perekonomian itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Tingginya tingkat pengangguran suatu daerah akan mencerminkan baik buruknya perekonomian daerah tersebut, dalam artian tingginya tingkat pengangguran akan menunjukkan kondisi perekonomian semakin buruk.

Dampak buruk yang disebabkan oleh pengangguran dimanapun harus segera diatasi termasuk di Provinsi Banten walaupun sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Banten yang terus bertambah, tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah yang sedang berkembang dapat menghambat proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang besar akan membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Hal ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat (Aswanto dan Ahmad, 2021).

Data pada gambar 1.1 menunjukkan jika dalam kurun waktu 2010-2020 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten sebesar 2,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 2,17%. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan adanya pertumbuhan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 2,23% dan 2,33%, namun pada tahun 2014-2016 laju pertumbuhan penduduk kembali

mengalami penurunan sampai 1,88%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk kembali menunjukkan peningkatan sebesar 2,2%, tapi tidak butuh waktu lama lagi laju pertumbuhan penduduk kembali menunjukkan penurunan pada kurun waktu 2018-2020. Jumlah penduduk di Provinsi Banten secara jumlah masih terbilang besar. Berdasarkan data BPS (2020), Provinsi Banten termasuk kedalam 6 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar maka akan berdampak pada tingkat pengangguran.



Gambar 1.1 Pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Banten (2021, data diolah)

Pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan bertambahnya lapangan usaha, kesempatan kerja dan kapasitas yang kecil, dengan pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya maka akan mengakibatkan pengangguran mengalami kenaikan. Hal ini sesuai anggapan Pitartono dan Hayati (2012), Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDRB akan berhubungan dengan tingkat pengangguran, setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja.



Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Indonesia ADHK 2010 Tahun 2011-2020 (Persen)

Sumber : BPS Banten dan Nasional (2021, data diolah)

Pada gambar 1.2 di atas menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Banten dan Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020 berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, dimana pertumbuhan ekonomi keduanya setiap tahunnya berfluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Banten mengalami peningkatan sebesar 7,03% dari tahun 2010 yang besarnya 6,56%. Pada tahun 2012 sampai 2016 pertumbuhan ekonomi Banten mengalami penurunan menjadi 6,83% sampai 5,28%, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,75% dan 5,29%. Pada tahun 2019 sampai 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mengalami penurunan kembali menjadi -3,38. Secara nasional pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten bisa di bilang lebih baik, dapat kita lihat pada grafik di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten masih berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk (2021) membuktikan jika Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengangguran. Artinya setiap peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu daerah akan berdampak pada penurunan jumlah pengangguran terbuka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardiansyah dkk (2016) juga membuktikan hal serupa yaitu pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah Upah Minimum. Upah minimum merupakan peraturan yang menetapkan upah terendah untuk tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pengaruh antara upah dan pengangguran dijelaskan melalui kurva Phillips. Menurut Priyono dan Ismail (2012), Phillips menemukan hubungan terbalik yang konsisten antara upah dan pengangguran, ketika pengangguran tinggi, upah meningkat perlahan, ketika pengangguran rendah, upah naik dengan cepat. Phillips menduga bahwa semakin rendah tingkat pengangguran, yang ketat pasar tenaga kerja dan oleh karena itu, perusahaan lebih cepat harus menaikkan upah untuk menarik tenaga kerja yang langka.

No.	Tahun	Upah Minimum Provinsi Banten 2010-2020 (Rp)
1	2010	955.300
2	2011	1.000.000
3	2012	1.040.000
4	2013	1.170.000
5	2014	1.325.000
6	2015	1.600.000
7	2016	1.784.000
8	2017	1.931.180
9	2018	2.099.385
10	2019	2.267.990
11	2020	2.460.996

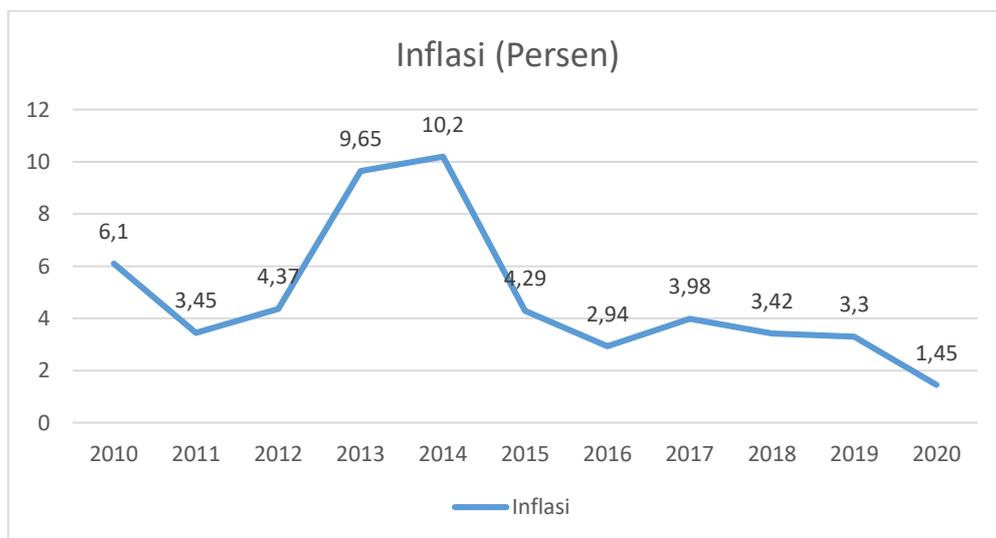
Tabel 1.2 Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2010-2020

Sumber: BPS Provinsi Banten (2021, data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di Provinsi Banten dari tahun 2010 sampai tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota atau bisa dianggap sebagai wilayah penyangga perekonomian ibu kota, tingkat upah minimum yang ditetapkan pada Provinsi Banten masih tergolong rendah di Indonesia. Upah yang ditetapkan pada tahun 2010 sebesar Rp 955.300 perbulan, sampai pada tahun 2020 upah minimum yang ditetapkan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 2.460.996 perbulan. Menurut Ratriani dalam Kontan.co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-lengkap-ump-2020-tertinggi-dki-jakarta->

terendah-jawa-tengah, upah minimum Ibu Kota Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 4.267.349 hampir dua kali lebih besar daripada upah minimum Provinsi Banten.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengangguran yaitu Inflasi. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah utama yang dihadapi setiap masyarakat. Hubungan antara inflasi dan pengangguran digambarkan juga oleh kurva Phillips, dimana hubungan inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.



Gambar 1.3 Laju Inflasi Provinsi Banten Tahun 2011-2020 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Banten (2021, data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa inflasi di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2010-2020 mengalami fluktuatif. Inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,1% dan mengalami penurunan sebesar 3,45% pada tahun 2011. Sejak tahun 2012 sampai 2014 inflasi mengalami kenaikan sebesar 4,37% sampai 10,2%. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 inflasi mengalami penuruna kembali sebesar

4,29% sampai 2,94%. Pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan sebesar 3,98%. Sejak tahun 2018 sampai 2020 inflasi turun kembali sebesar 3,42% sampai 1,45%.

Berdasarkan uraian tersebut, pengangguran merupakan suatu ukuran dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi maupun pantauan untuk perkembangan pembangunan khususnya di Provinsi Banten. Maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul **“Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dan informasi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai analisis tingkat pengangguran dan bidang ilmu lainnya yang terkait.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran dan lebih dapat memaksimalkan potensinya untuk dapat mengoptimalkan hasil belajarnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan terkait dengan perkembangan ekonomi di Provinsi Banten.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Banten. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dalam angka dan sumber lain yang relevan dengan kajian peneliti.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022, dengan perkiraan antara bulan Februari sampai dengan Juli 2022 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan/Tahun 2022																											
	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan Judul																												
Bimbingan																												
Pembuatan Usulan Penelitian																												
Seminar Usulan Penelitian																												
Pengumpulan Data																												
Analisis Data																												
Penyusunan Skripsi																												
Sidang Skripsi																												